

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2016 dan 2017)

Vita Kumalasari

Vitakmlsr200897@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Pembimbing :

Andan Yuniarto, S.E, M.Sc., Ak., CA

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of corporate social responsibility disclosure, institutional ownership, proportion of independent commissioners, audit committee, audit quality towards tax avoidance. The population in this research is manufacturing companies listed in indonesia stock exchange for the periode 2016 dan 2017. In this study sample selected by purposive sampling method and retrieved 78 companies that fit the criteria for sample. Data collection techniques in this study done by the documentation technique by collecting documentary data sources such as annual reports of the companies that became the sample of the research or obtained from database of Indonesian Stock Exchange and www.idx.co.id. Hypothesis testing is done using multiple regression analysis. The data processing is done by either using a multiple linear regression by statistical test using SPSS 15.

Based on the analysis has been done, the result show that corporate social responsibility disclosure has negative effect on tax avoidance, institutional ownership has positive effect on tax avoidance, proportion of independent commissioners has not effect on tax avoidance, audit committee has not effect on tax avoidance and audit quality has not effect on tax avoidance.

Keywords: corporate social responsibility disclosure, institutional ownership, proportion of independent commissioners, audit committee, audit quality, tax avoidance.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Ketentuan pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dijelaskan bahwa ada tuntutan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan mendudukkan kewajiban pajak sebagai kewajiban suatu negara. Keputusan-keputusan bisnis yang berkaitan dengan pajak ini memaksa untuk melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak (Suandy, 2014). Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan dapat menguntungkan bagi perusahaan tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang (Jessica dan Toly, 2014).

Kasus penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan ini beserta anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia diduga telah melakukan penghindaran pajak mencapai 2,1 triliun. Atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak. Dari kasus yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk tersebut, menjelaskan bahwa masih ada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan menggelapkan dana pada laporan keuangan.

Hal tersebut karena terdapat perbedaan pendapat tentang pajak antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan menganggap bahwa pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan tersebut yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak (Ratmono, 2015).

Fakta tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal. Salah satunya karena adanya fenomena penghindaran pajak. Penghindaran pajak biasa disebut sebagai pertentangan terhadap pajak yang merupakan suatu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengurangi penerimaan kas negara. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan sebagai persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa hal yaitu *corporate social responsibility disclosure* dan *corporate governance*. CSR merupakan suatu bentuk komitmen bisnis agar bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat umum dan merupakan kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Tjondro dkk (2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan kualitas CSR yang baik adalah perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Alasannya, perusahaan dengan kualitas CSR yang baik adalah perusahaan dengan sumber daya yang banyak,

maka perusahaan tersebut dapat menjalankan kegiatan CSR terus-menerus dan dengan mudah membayar pajak.

Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menurut beberapa penelitian juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola suatu perusahaan. Dengan adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, kinerja perusahaan dapat terkontrol. *Corporate Governance* (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari adanya permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006 dalam Armstrong, 2013). Dengan adanya penggunaan *corporate governance* maka dapat mengawasi kemampuan pengelola perusahaan yang salah satunya berkaitan dengan pajak dalam perusahaan tersebut.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Sandy dan lukviarman (2015).

2. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah aspek yang akan diukur dari *Corporate Governance* adalah Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit dalam suatu perusahaan.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility disclosure* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah *Corporate Social Responsibility disclosure* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Untuk menguji apakah Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Untuk menguji apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Untuk menguji apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

B. Landasan Teori dan Penurunan Hipotesis

1. Teori Kepentingan Umum (*Stakeholder Theory*)

Teori menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan saja, melainkan harus memiliki tanggung jawab sosial dengan

mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari tindakan atau kebijakan strategi perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya dalam menyeimbangkan beragam kepentingan dari *stakeholder*. Teori pemangku kepentingan didefinisikan sebagai suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu (Freeman, 1984).

2. Teori Legitimasi

Teori ini didefinisikan sebagai teori yang fokus terhadap interaksi antara perusahaan dengan para *stakeholder*. Perusahaan memerlukan pengakuan dari para investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat agar dapat bertahan hidup. Kesadaran suatu perusahaan bahwa kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada hubungan suatu perusahaan dengan lingkungan dan masyarakatnya, maka sesuai dengan teorinya dimana perusahaan dituntut untuk melakukan aktivitasnya yang sesuai dengan nilai-nilai *justice* dan batasan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah kontrak antara satu atau lebih individu dengan individu lain, salah satu pihak berperan sebagai *principal* dan pihak lain sebagai *agent*. Dalam pemberian wewenang, terdapat kesepakatan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen untuk mengelola perusahaan dengan tujuan utama yaitu memaksimalkan laba suatu perusahaan.

4. *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Pengungkapan *corporate social responsibility* bertujuan untuk mendapatkan legitimasi yang positif dari masyarakat. Suatu perusahaan menyadari bahwa kontrak sosial dengan masyarakat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan dan dengan adanya CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa suatu perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *justice* dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok yang penting untuk melegitimasi tindakan perusahaan tersebut. (Suwardi dan Setiawan, 2010).

Penelitian yang dilakukan Tjondro dkk (2016), Muzakki dan Darsono (2015), Lanis dan Richardson (2012) dan Watson (2011) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁ : *Corporate Social Responsibility disclosure* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

5. Kepemilikan Institusional

Dalam teori keagenan institusi sebagai *principal* akan meyerahkan tanggung jawab kepada *agent* untuk mengelola investasi suatu perusahaan yang nanti institusi akan terus melakukan pengawasan secara professional mengenai perkembangan investasinya

yang menyebabkan tingkat penghindaran pajak. Perusahaan bertanggung jawab atas pemegang saham, pemilik institusi memastikan perusahaan menjalankan perusahaan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga semakin besar saham yang dimiliki instansi maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Dengan besarnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi, maka akan mengurangi manajer dalam melakukan kecurangan seperti penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2016), Syeldita dan Niki (2015), dan Cahya dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

6. Proporsi Dewan komisaris Independen

Dari perspektif teori agensi, anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari komisaris independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka, sehingga dapat merugikan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010). Sedangkan dari perspektif *stakeholder*, keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan merupakan strategi *stakeholder* untuk ikut berpengaruh dan mengawasi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahya dan Suardana (2014), Kurniasih dan Sari (2013), Syeldila dan Niki (2015), Timothy (2010), Lanis dan Richardson (2011), Maharani dkk (2014) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

7. Komite Audit

Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang, jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan perturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dan Syeldila dan Niki (2015) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah

H₄ : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

8. Kualitas Audit

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The big four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit

melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009). Pernyataan tersebut sesuai dengan *teori stakeholder* yaitu Gray (1997) menjelaskan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Semakin kuat stakeholder, maka semakin besar pula usaha yang harus dilakukan perusahaan untuk beradaptasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Maharani dan Suardana (2014), dan Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

C. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek atau populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 dan 2017.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumbernya serta telah diolah oleh pihak lain.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu metode penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai berikut :

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 dan 2017 dan menerbitkan laporan tahunan yang dapat diakses di www.idx.co.id.
- Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember dan lengkap dengan data yang terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian.
- Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2016 dan 2017.

4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Resonsibility* dan *Corporate Governance*.

a. Corporate Social Responsibility

CSR diproksikan ke dalam pengungkapan CSR yang diukur dengan menggunakan *check list* yang mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan secara umum di dunia yaitu *Global Reporting Initiative G.4 (GRI G.4)* yang bisa diakses di www.globalreporting.org. Cara yang dilakukan dalam pengukuran ini adalah dengan cara mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Setiap item CSR yang diungkapkan maka diberi nilai 1, sedangkan item tidak diungkapkan maka diberi nilai 0. Skor dari semua item CSR lalu dibagi dengan jumlah item yang diharapkan, sehingga rumus pengukuran pengungkapan CSR yaitu :

$$CSR = \frac{\text{item CSR perusahaan}}{\text{total item indikator GRI G.4}}$$

b. Kepemilikan Institusional

Besar kecilnya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase (Khurana and Moser, 2009). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

c. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut Sillagan dan Machfoedz (2006) adanya variabel Proporsi dewan komisaris independen dapat menunjang kinerja perusahaan dan mampu meningkatkan efektifitas monitoring. Dalam penelitian ini, Dewan Komisaris diukur dari 30% anggota dewan komisaris yang ada pada suatu perusahaan. Semakin banyak Dewan Komisaris Independen pada suatu perusahaan maka semakin rendah penghindaran pajak perusahaan tersebut.

$$PDKI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

d. Komite Audit

Kehadiran komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal (Mayangsari, 2003). Dalam penelitian ini, komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank di Negara Indonesia No. 8/14/PB/2006 tentang pelaksanaan *Corporate Governance* jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

$$KA = \text{Jumlah Komite Audit}$$

e. **Kualitas Audit**

Kualitas audit biasanya diukur menurut besar atau kecilnya ukuran Kantor Akuntansi Publik yang telah melakukan audit pada suatu perusahaan. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *the big four* (*Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young*), maka akan lebih independen karena mampu bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan adanya pelanggaran.

2. **Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel-variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen. ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Yoehana, 2013). Perhitungan ETR menggunakan model dari Lanis dan Richardson (2012).

$$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

5. **Uji Kualitas Data**

a. **Uji Statistik Deskriptif**

Ghozali (2012) menyatakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau pandangan mengenai data yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum.

b. **Uji Asumsi Klasik**

1. **Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah pengujian yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak dalam model regresi. Syarat bahwa model regresi residual bedistribusi normal apabila data memiliki nilai sig lebih dari 0,05 (Nazzaruddin dan Basuki, 2015)

2. **Uji Multikolinieritas**

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Data dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas apabila memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 (Nazzarudin dan Basuki, 2015).

3. **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan atau pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu tahun sebelumnya (Ghozali, 2011). Apabila nilai signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau asumsi auto korelasi dapat terpenuhi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah akan terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Apabila nilai signifikansi dari hasil pengujian $> 0,05$ atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas di dalam model regresi atau asumsi homokedastisitas dapat dipenuhi.

c. Uji Hipotesis

1. Uji koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian ini dapat dilihat melalui nilai *Adjusted R²*. Semakin tinggi nilai dari *Adjusted R²* maka semakin banyaknya suatu variabel independen terlibat.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pengaruh dari variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen secara bersamaan atau simultan. Uji ini diperoleh melalui tabel anova. Syarat bahwa variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen jika nilai $\text{sig} < (0,05)$.

3. Uji Parsial (Uji *t*)

Untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen maka digunakan uji signifikan parsial (uji *t*). Hasil pengujian ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dan nilai *Unstandardized Coefficients B*. Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai $\text{sig} < (0,05)$.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Obyek penelitian

Sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian mencakup data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pada periode 2016 dan 2017 secara berturut-turut agar lebih menjelaskan kondisi pada saat ini. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena jumlah perusahaan manufaktur sangat banyak, setiap tahunnya sekitar 143 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan data yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan menggunakan 78 perusahaan yang sesuai kriteria. Prosedur pemilihan sampel dapat diukur pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Proses pemilihan sampel

Kriteria perusahaan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	143
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap	(33)
Perusahaan manufaktur yang mengalami rugi	(53)
Sampel yang digunakan 57 x 2 tahun	114
Sampel dengan outlier	(36)
Jumlah sampel yang diolah	78

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif ini digunakan untuk mengetahui tentang jumlah data, range, nilai mean, nilai minimal, nilai maksimal, varian, standar deviation, skewness, kurtosis dari setiap variabel yang ada dalam sebuah penelitian.

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSRD	78	.09	.38	.2222	.07214
KI	78	.02	.93	.4905	.25340
PDKI	78	.00	1.00	.4166	.14899
KA	78	1	4	2.91	.488
KUA	78	0	1	.54	.502
TA	78	.03	.54	.2519	.07690
Valid N (listwise)	78				

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		78
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07046436
	Absolute	.084
	Positive	.059
	Negative	-.084
	Kolmogorov-Smirnov Z	.745
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.635

Hasil pengujian normalitas memperoleh nilai sig sebesar 0,635 yang berarti nilai signifikansinya $> 0,05$ yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.203	.057		3.553	.001		
CSR	.381	.129	.357	2.943	.004	.792	1.263
KI	-.067	.033	-.219	-2.004	.049	.975	1.026
PDKI	-.038	.056	-.074	-.681	.498	.985	1.016
KA	.009	.018	.057	.516	.607	.940	1.064
KUA	-.025	.018	-.162	-1.355	.180	.818	1.222

Hasil Pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF variabel independennya < 10 . Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independennya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Autokoreasi

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value(a)	-.00168
Cases < Test Value	39
Cases >= Test Value	39
Total Cases	78
Number of Runs	43
Z	.684
Asymp. Sig. (2-tailed)	.494

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai sig 0,494 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

			CSR	KI	PDKI	KA	KUA	TA
Spearman 's rho	CSR	Correlation Coefficient	1.000	.112	.082	.229(*)	.405(**)	.073
		Sig. (2-tailed)	.	.329	.474	.043	.000	.528
		N	78	78	78	78	78	78
	KI	Correlation Coefficient	.112	1.000	-.019		.115	-.200
		Sig. (2-tailed)	.329	.	.870	.828	.315	.079
		N	78	78	78	78	78	78
	PDKI	Correlation Coefficient	.082	-.019	1.000	.029	.123	-.084
		Sig. (2-tailed)	.474	.870	.	.801	.282	.467
		N	78	78	78	78	78	78
	KA	Correlation Coefficient	.229(*)	.025	.029	1.000	.053	.010
		Sig. (2-tailed)	.043	.828	.801	.	.645	.931
		N	78	78	78	78	78	78
	KUA	Correlation Coefficient	.405(**)	.115	.123	.053	1.000	.006
		Sig. (2-tailed)	.000	.315	.282	.645	.	.956
		N	78	78	78	78	78	78

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai sig masing-masing variabel > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.400(a)	.160	.102	.07287	2.331

Hasil pengujian menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,102 yang berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 10,2% oleh variabel independen. Sisanya 89,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4.8
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.073	5	.015	2.750	.025(a)
	Residual	.382	72	.005		
	Total	.455	77			

Hasil pengujian memiliki nilai sig $0,025 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan *corporate social responsibility disclosure*, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

c. Uji *t*

Tabel 4.9
Hasil Uji *t*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.203	.057		3.553	.001
CSRSD	.381	.129	.357	2.943	.004
KI	-.067	.033	-.219	-2.004	.049
PDKI	-.038	.056	-.074	-.681	.498
KA	.009	.018	.057	.516	.607
KUA	-.025	.018	-.162	-1.355	.180

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat disimpulkan persamaan regresi adalah :

$$TA = 0,203 + 0,381CSRSD - 0,067KI - 0,038PDKI + 0,009KA - 0,025KUA + e.$$

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Kode	Hipotesis	Keterangan
H ₁	<i>Corporate social responsibility disclosure</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Diterima
H ₂	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Ditolak
H ₃	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Ditolak
H ₄	Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Ditolak
H ₅	Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Ditolak

5. Pembahasan

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama menunjukkan bahwa *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian (H_1) diterima. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu perusahaan menyadari bahwa kontrak sosial dengan masyarakat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan dan dengan adanya CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki dan Darsono (2015), Lanis dan Richardson (2012) dan Watson (2011) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian (H_2) ditolak. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Simmons (2006) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan irwansyah (2017).

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian (H_3) ditolak. Hal ini dikarenakan meningkatnya proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dilakukan hanya untuk memenuhi peraturan yang ada di dalam perusahaan, sehingga banyak atau tidaknya komisaris independen tidak menjamin bahwa fungsi pengawasan dalam perusahaan semakin efektif atau tidak efektif. Adanya pemegang saham mayoritas juga masih sangat memegang peranan yang penting dalam perusahaan terutama dalam hal mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian (H_4) ditolak. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga

memiliki kelemahan seperti minimnya pengalaman anggota. Sriwedari (2009) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini kemungkinan dikarenakan rata-rata jumlah komite audit di setiap perusahaan sama, baik perusahaan besar maupun kecil yang sudah *listing* sehingga jumlah komite audit tidak bisa menjadi jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, komite audit hanya membantu para dewan komisaris independen sebagai penghubung antara para dewan komisaris dengan auditor eksternal sebuah perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dan Fadhillah (2014) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian (H_5) ditolak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (*Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG*) tidak menjamin perusahaan itu melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan audit yang dilakukan KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan, dimana audit laporan keuangan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tidak sampai mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan yang salah satunya yaitu penghindaran pajak. Sedangkan yang lebih berwenang dalam mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu auditor forensik. Audit forensik bertugas untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan di pengadilan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2014).

E. Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran

1. Kesimpulan

- a. *Corporate social responsibility disclosure* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
- b. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
- c. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- d. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- e. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur saja sehingga kurang mampu mengeneralisasi penghindaran pajak.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan data dengan jangka waktu penelitian selama 2 tahun.

3. Saran

- a. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan variabel lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- b. Pada penelitian selanjutnya diharapkan memperluas obyek penelitian atau sampel yang digunakan, misalnya tidak hanya menggunakan perusahaan manufaktur saja tetapi semua jenis perusahaan sehingga dapat membandingkan indeks pengungkapan dari berbagai jenis perusahaan.
- c. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah jangka waktu penelitian agar hasil yang didapatkan bias lebih akurat dan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Butje, Stella dan Elisa Tjondro. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*. Vol.4 No.2.
- Chai, H, dan Liu, Q. 2010. Competition and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Industrial Firms.
- Desai, M.A. & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.2.
- Freeman, R. E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston, Pitman.
- Ghozali, Imam. 2011. “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit
- Jensen dan Meckling (1976), The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structur, *Journal of Financial and Economics*, 3:305-360
- Jessica., Toly, A. A. (2014). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveves*.
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 1 (18), 58-66.
- Lanis, R. and G. Richardson.(2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An empirical analysis..*Journal of Accounting and Public Policy*, 86 108

- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN:2302-8556.
- Mayangsari, Sekar. 2003. *Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Symposium Nasional Akuntansi VI.*
- Muzakki, M. R., & Darsono, D. (2015). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013). (*Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*).
- Nazaruddin, Ietje dan Basuki, Agus Tri.(2015). Analisis Statistik dengan SPSS.Yogyakarta: Danisa Media.
- Pohan, Aulia. 2008. *Ekonomi Moneter*. Buku II. Edisi 1.Cetakan kesepuluh. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Pradipta dan Supriyadi. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *E- Jurnal Universitas Gadjah Mada*.
- Ratmono, Dwi dan Winarti Monika Sagala. 2015. *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. E-Journal Universitas Diponegoro.*
- Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *JAAI*. Vol. 19, No. 2 Tahun 2015.
- Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki. 2015. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *JAAI*. Vol. 19, No. 2 Tahun 2015.
- Suandy Erly. (2014). *Hukum Pajak* , Edisi 6 .Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Titisari, Kartika Hendra, Eko Suwardi, dan Doddy Setiawan. 2010. *Corporate Social Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*
- Watson, Luke (2011). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness. An Examination of Unrecognized Tax Benefits. American Taxation Association Midyear Meeting Paper: New Faculty/Doctoral Student Research Session
- Yoehana, Mareta. 2013. “Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting*.